

TESIS

**REFORMULASI KEBIJAKAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
DAN KEPENTINGAN NASIONAL
(Studi Kasus Satria Arta Kumbara)**

***REFORMULATION OF INDONESIAN CITIZENSHIP POLICY IN THE
PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS AND NATIONAL INTERESTS
(A Case Study of Satria Arta Kumbara)***



Oleh:

RISMA APRIYANTI

NIM. 2410622003

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
JAKARTA
2026**

TESIS

**REFORMULASI KEBIJAKAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
DAN KEPENTINGAN NASIONAL
(Studi Kasus Satria Arta Kumbara)**

***REFORMULATION OF INDONESIAN CITIZENSHIP POLICY IN THE
PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS AND NATIONAL INTERESTS
(A Case Study of Satria Arta Kumbara)***



Oleh:

RISMA APRIYANTI

NIM. 2410622003

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
JAKARTA
2026**

HALAMAN JUDUL

**REFORMULASI KEBIJAKAN KEWARGANEGARAAN
INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
DAN KEPENTINGAN NASIONAL
(Studi Kasus Satria Arta Kumbara)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh:

RISMA APRIYANTI

NIM. 2410622003

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

REFORMULASI KEBIJAKAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN KEPENTINGAN NASIONAL (Studi Kasus Satria Arta Kumbara)

Disusun dan diajukan oleh

RISMA APRIYANTI

NIM. 2410622003

Disetujui untuk Tahap TESIS

Pada Tanggal 3 Juni 2026

Menyetujui:

Pembimbing I



Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri,
S.H., M.H.

NIP. 196005021986031003

Pembimbing II



Dr. Irsyaf Marsal, S.H., M.H.
NIP. 196603062024211001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon 021-7656971 , Fax 021-7656904
Laman : hukum.upnvj.ac.id , e-mail: fh@upnvj.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

REFORMULASI KEBIJAKAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
DAN KEPENTINGAN NASIONAL
(Studi Kasus Satria Arta Kumbara)

Disusun dan diajukan oleh:

RISMA APRIYANTI

NIM. 2410622003

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Pada Tanggal 7 Juli 2026
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1

Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri,
S.H., M.H.

NIP. 196005021986031003

Pembimbing 2

Dr. Irsyaf Marsal, S.H., M.H.
NIP. 196603062024211001

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Suherman, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

Koordinator Program Studi
Magister Hukum

Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I.,
S.H., M.H.
NIP. 198910192025211048

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Risma Apriyanti
NIM : 2410622003
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **“Reformulasi Kebijakan Kewarganegaraan Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kepentingan Nasional (Studi Kasus Satria Arta Kumbara)”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jakarta, 30 April 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Risma Apriyanti
NIM. 2410622003

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risma Apriyanti

NIM : 2410622003

Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Reformulasi Kebijakan Kewarganegaraan Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kepentingan Nasional (Studi Kasus Satria Arta Kumbara)”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 April 2016

Yang Membuat Pernyataan,



Risma Apriyanti
NIM. 2410622003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Reformulasi Kebijakan Kewarganegaraan Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kepentingan Nasional (Studi Kasus Satria Arta Kumbara)”**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama proses penyusunan tesis ini :

1. Dr. Anter Venus, MA.Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
2. Dr. Suherman, SH., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
3. Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian/Jurusan Studi Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
4. Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Magister Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
5. Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. selaku Pembimbing I Penulis yang telah meluangkan waktu, perhatian, dan tenaga untuk memberikan bimbingan, koreksi, serta berbagai masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian tesis ini;
6. Dr. Irsyaf Marsal, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, saran, dan pendampingan kepada Penulis selama proses penyusunan tesis;
7. Kedua orangtua Penulis, Bapak Misno dan Ibu Cicih Mintarsih serta adikku Rendi Febriyana, yang senantiasa memberikan bimbingan, dukungan moral, motivasi, dan doa selama proses penyusunan tesis ini;

8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta atas ilmu pengetahuan dan dukungan yang telah diberikan;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Angkatan 2024, yang senantiasa saling mendukung dan menciptakan suasana kebersamaan selama proses perkuliahan;
10. Ibu Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Hukum yang senantiasa memberikan dukungan dan nasihat kepada Penulis;
11. Bapak Kepala Bagian dan Teman-teman Pengelolaan Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Hukum yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis;
12. Ibu Kepala Bagian dan Teman-teman Program dan Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Hukum yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis;
13. Serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian tesis ini namun tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.;

Penulis berharap semoga segala bentuk dukungan dan kontribusi yang telah diberikan memperoleh balasan yang terbaik dari Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat berbagai keterbatasan. Oleh sebab itu, masukan, kritik, dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi bagian dari upaya akademik yang bernilai dan bermakna.

Jakarta, 07 Juli 2026

Penulis

Risma Apriyanti

ABSTRAK

REFORMULASI KEBIJAKAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN KEPENTINGAN NASIONAL (Studi Kasus Satria Arta Kumbara).

Risma Apriyanti (NIM. 2410622003), Taufiqurrohman Syahuri, Irsyaf Marsal.

Kewarganegaraan merupakan hak fundamental yang melahirkan hubungan hukum timbal balik antara individu dan negara sehingga tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang. Namun, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur kehilangan kewarganegaraan secara otomatis bagi WNI yang bergabung dalam militer asing tanpa izin Presiden, yang menimbulkan persoalan antara perlindungan HAM dan kepentingan keamanan negara. Penulis ingin mengetahui bagaimana kedudukan status kewarganegaraan warga negara Indonesia yang bergabung dengan militer asing sebagai Tentara bayaran ditinjau dari perspektif hak asasi manusia serta bagaimana reformulasi pencabutan kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia yang bergabung dalam militer asing sebagai Tentara bayaran sesuai dengan perspektif hak asasi manusia dan kepentingan nasional

Penelitian ini menggunakan metode normatif. Peneilitan menggunakan data yang merujuk pada literatur dan sumber-sumber tertulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehilangan kewarganegaraan Indonesia bagi warga negara yang bergabung dalam militer asing sebagai tentara bayaran tidak dapat dilakukan secara otomatis hanya karena terpenuhinya unsur normatif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Kehilangan kewarganegaraan harus melalui mekanisme administratif dan prosedur hukum yang menjunjung prinsip *due process of law*, *non-arbitrariness*, serta perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kewarganegaraan dan pencegahan statelessness. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengaturan kewarganegaraan Indonesia telah berupaya menyeimbangkan perlindungan HAM dan kepentingan nasional, namun masih memerlukan penguatan regulasi dan mekanisme implementasi dalam menghadapi keterlibatan WNI dalam militer asing atau konflik bersenjata transnasional. Berdasarkan perbandingan dengan Belanda, Korea Selatan, dan Afrika Selatan, pengendalian keterlibatan warga negara dalam konflik bersenjata asing tidak hanya dilakukan melalui pencabutan kewarganegaraan, tetapi juga melalui pengawasan administratif, pembatasan keimigrasian, dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan kewarganegaraan melalui penegasan definisi tentara asing, tentara bayaran, dan *foreign terrorist fighters*, serta penguatan mekanisme administratif, pengawasan keimigrasian, dan koordinasi antarlembaga.

Kata Kunci: Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia, Kepentingan Nasional, Militer Asing

ABSTRACT

REFORMULATION OF INDONESIAN CITIZENSHIP POLICY IN THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS AND NATIONAL INTERESTS (A Case Study of Satria Arta Kumbara).

Risma Apriyanti (NIM. 2410622003), Taufiqurrohman Syahuri, Irsyaf Marsal.

Citizenship constitutes a fundamental right that establishes a reciprocal legal relationship between an individual and the state and, therefore, must not be arbitrarily revoked. However, Law Number 12 of 2006 concerning the Citizenship of the Republic of Indonesia provides for the automatic loss of citizenship for Indonesian citizens who voluntarily join a foreign military service without prior authorization from the President, giving rise to tensions between the protection of human rights and the interests of national security and state sovereignty. This research aims to examine the legal status of Indonesian citizens who join foreign military forces as mercenaries from a human rights perspective, as well as to analyze the reformulation of citizenship revocation policies concerning such individuals in accordance with human rights principles and national interests.

This study employs a normative legal research method using data derived from literature, legislation, and other written legal sources.

The findings of this research demonstrate that the deprivation of Indonesian citizenship for nationals who join foreign military forces as mercenaries cannot be imposed automatically solely based on the fulfillment of normative elements under Law Number 12 of 2006. Any deprivation of citizenship must be carried out through administrative mechanisms and legal procedures that uphold the principles of due process of law, non-arbitrariness, and the protection of human rights, particularly the right to nationality and the prevention of statelessness. The study further reveals that the Indonesian citizenship regime has sought to balance human rights protection and national interests; however, it still requires stronger regulatory frameworks and implementation mechanisms in addressing the involvement of Indonesian citizens in foreign military forces or transnational armed conflicts. Based on a comparative analysis of the Netherlands, South Korea, and South Africa, the regulation of citizens' involvement in foreign armed conflicts is not solely implemented through citizenship deprivation, but also through administrative supervision, immigration restrictions, and criminal accountability mechanisms. Therefore, a reformulation of Indonesian citizenship policy is necessary through the clarification of legal definitions concerning foreign military service, mercenaries, and foreign terrorist fighters, as well as through the strengthening of administrative mechanisms, immigration supervision, and inter-agency coordination.

Keywords: *Citizenship, Human Rights, National Interests, Foreign Military.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Kajian Teoritis.....	20
1. Teori Kewarganegaraan	20
2. Teori Hak Asasi Manusia.....	25
3. Teori Kedaulatan Negara	39
B. Kerangka Pikir	42
C. Definisi Operasional.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Tipe Penelitian	50
D. Sifat Penelitian	50
E. Metode Pengumpulan Data	51
F. Sumber Bahan Hukum	51
G. Teknik Analisis	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Kedudukan Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia yang Bergabung dengan Militer Asing sebagai Tentara Bayaran ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia.....	55

1. Kedudukan Hak atas Kewarganegaraan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	55
2. Praktik Keterlibatan dalam Militer Asing	61
3. Status Kewarganegaraan Indonesia terhadap Warga Negara yang Bergabung dengan Militer Asing sebagai Tentara Bayaran	72
B. Reformulasi pencabutan kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia yang bergabung dalam militer asing sebagai Tentara Bayaran sesuai dengan perspektif hak asasi manusia dan kepentingan nasional	91
1. Perbandingan Pengaturan Tentara Bayaran dan Kehilangan Kewarganegaraan	99
2. Reformulasi Pengaturan Pencabutan Kewarganegaraan terhadap WNI yang Bergabung dalam Militer Asing sebagai Tentara Bayaran sesuai dengan perspektif HAM dan kepentingan nasional	124
BAB V PENUTUP	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA	140